

BAB II

PRAKTIK KERJA PAKSA INDUSTRI KAPAS DI UZBEKISTAN

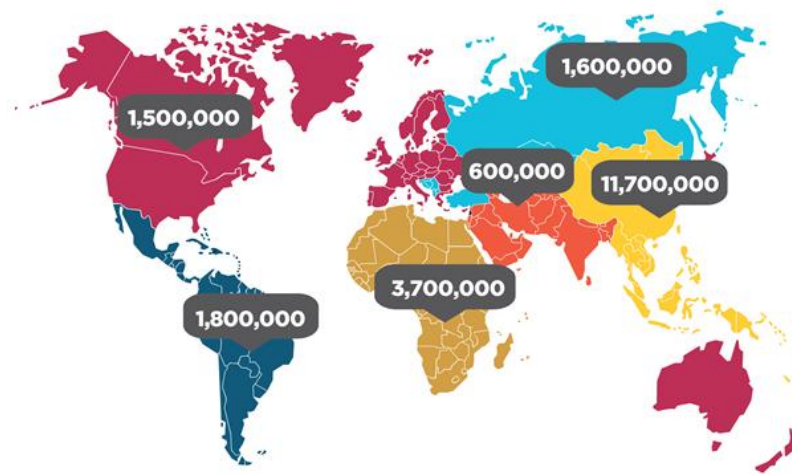
2.1. Kerja Paksa sebagai Isu Hubungan Internasional

Definisi dari kerja paksa diabadikan didalam Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa No. 29 (1930). Menurut Pasal 2, kerja paksa didefinisikan sebagai (Andrees, 2008): “semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela.” Pelaksanaan kerja paksa pertama kali dilakukan oleh Nazi pada tahun 1937. Nazi menerapkan praktek kerja paksa dengan tujuan untuk meraih keuntungan ekonomi dan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja yang terbatas ketika dalam masa perang (Museum).

Kerja paksa menjadi salah satu perhatian di dalam isu-isu internasional. Terkait prakteknya yang melanggar hak asasi manusia hingga cara penghapusan agar tidak ada lagi praktek kerja paksa di belahan dunia manapun. Oleh karena itu, dibentuklah *International Labour Organization* (ILO) sebagai wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Penekanan berdirinya ILO sendiri untuk kerja paksa yang diberlakukan oleh negara hingga dewasa ini juga mencakup kerja paksa kontemporer yang terjadi dalam perekonomian swasta.

Kerja paksa adalah elemen paling umum dari perbudakan modern yang mana merupakan bentuk eksploitasi orang yang paling ekstrem. Praktek kerja paksa ini terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti gambar dibawah ini (Organization, 2012):

21 million people victims of forced labour



Gambar 1. Statistik kerja paksa, perbudakan modern dan perdagangan manusia

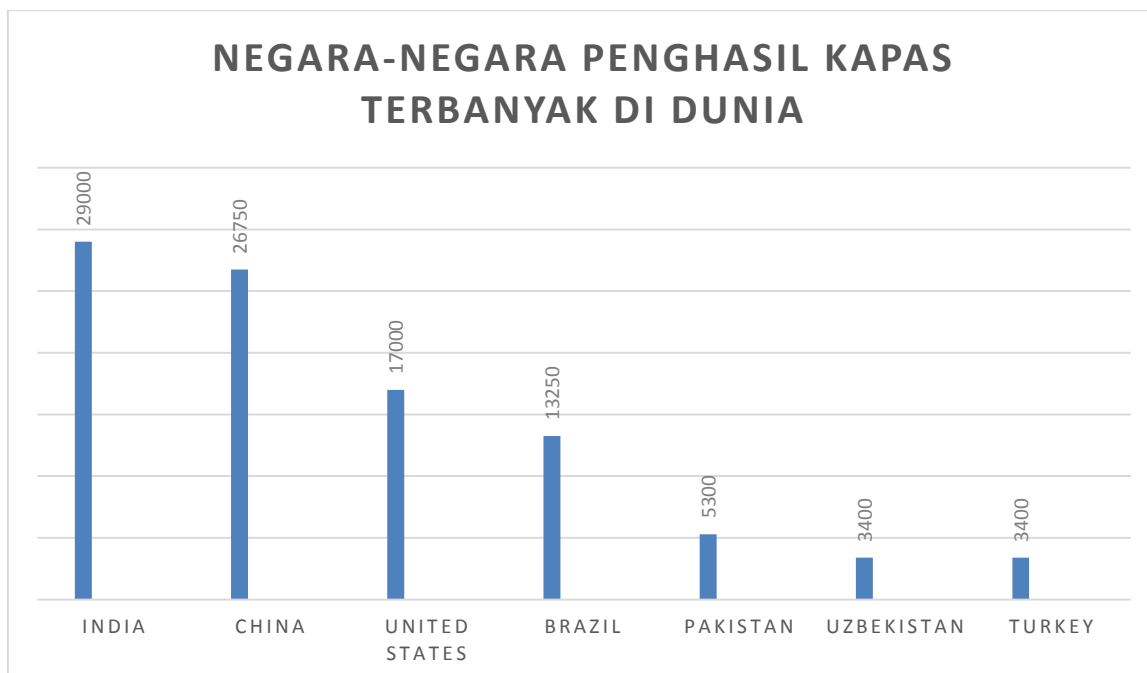
(Organization, International Labour, 2012).

Berdasarkan gambar di atas, negara-negara di benua Asia merupakan peringkat pertama yang menghasilkan korban kerja paksa terbesar di seluruh dunia. Kerja paksa terjadi hampir di berbagai sektor industri dunia. Mulai dari pertanian, pertambangan, yang mana merupakan bahan utama untuk menghasilkan suatu bahan atau daya dengan nilai jual yang tinggi. Dalam bab ini akan lebih membahas mengenai sektor industri kapas di dunia dengan lebih mengacu pada sektor industri kapas di Uzbekistan.

Kapas adalah bahan utama dalam pembuatan pakaian dan berbagai produk tekstil. Dari kapas kemudian dipintal menjadi benang kemudian dibentuk menjadi kain hingga akhirnya menjadi pakaian yang kita kenakan sekarang. Pakaian menjadi hal yang vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan sandang otomatis menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi. Selain alasan vital tersebut, pakaian juga sering dijadikan sebagai ajang gengsi untuk menunjukkan status sosial kalangan tertentu, dengan adanya berbagai merek-merek pakaian dan desainer yang ada di dunia.

Terdapat beberapa negara yang menjadi penghasil kapas terbesar di dunia.

Diantaranya adalah seperti tabel berikut:



Tabel 1. Tabel Produksi Kapas Terbanyak di Dunia (Index Mundi, 2021)

Dalam proses panen kapas yang terjadi di berbagai negara penghasil kapas seperti tabel di atas, terdapat fakta yang menyedihkan dimana para pemanen kapas tersebut dipekerjakan dengan upah yang minimum, tidak dibayar, diperlakukan tidak layak, dipekerjakan secara sukarela dan terpaksa, diantara pemanen kapas juga ada yang belum termasuk dalam kategori pekerja dan atau belum cukup umur untuk bekerja.

2.2. Gambaran Umum Praktik Kerja Paksa Industri Kapas di Uzbekistan

Praktik kerja paksa anak di Uzbekistan sudah ada sejak zaman Soviet. Praktik tersebut tidak juga dihapus ketika Uzbekistan memperoleh kemerdekaan (Association of Human Rights in Central Asia, 2010). Bagaimana tidak, Uzbekistan adalah salah satu produsen kapas terbesar di dunia. Sektor ini menghasilkan lebih dari \$ 1 miliar (£ 783m) dalam pendapatan tahunan.

Hampir seperempat dari populasi orang dewasa di Uzbekistan ambil bagian dalam panen kapas negara tersebut setiap tahun. Para peneliti di *School of Oriental and African Studies* di London melakukan studi mengenai fenomena pekerja paksa di ladang kapas Uzbekistan. Para peneliti tersebut mengungkapkan bahwa Uzbekistan menetapkan kuota panen kapas untuk setiap wilayah, menjual kapas ke luar negeri dengan harga pasar global. Tetapi karena para petani tidak mampu memenuhi kuota tersebut, para pejabat memerintahkan pegawai negara, termasuk dokter dan perawat, dan para siswa — di masa lalu termasuk anak-anak berusia sembilan tahun untuk ikut memanen kapas (The Economist, 2013).

Sekitar dua pertiga dari mereka adalah wanita, anak-anak dan orang dewasa dipaksa bekerja dari awal September hingga awal November, untuk memenuhi kuota kapas yang ditetapkan untuk setiap provinsi. Otoritas regional, polisi, dan administrator sekolah, akan melaporkan kepada Pemerintah pusat untuk mengangkut anak-anak dan orang dewasa dengan bus ke ladang-ladang kapas di Uzbekistan, di mana mereka yang jauh dari rumah mereka diberikan perumahan sementara. Para pekerja memetik kapas selama berminggu-minggu sekaligus, dan tidak bebas untuk pergi. Bukan hanya kapas yang dipanen dengan kerja paksa, tetapi kondisi di ladang kapas itu kasar dan berbahaya (Human Rights Watch, 2013). Pekerja hidup dalam kondisi kotor, menderita luka, dan bekerja dari pagi hingga sore hari, bahkan menerima sedikit atau tanpa upah. Orang dewasa dan anak-anak yang lebih tua diharuskan untuk memetik minimal 50 kilogram (atau 111 pon) per hari, dengan anak-anak yang lebih muda harus memenuhi kuota yang sedikit lebih rendah, berkisar antara 40 hingga 50 kilogram. Anak-anak dan orang dewasa bekerja berjam-jam, 10 hingga 12 jam sehari. Mereka menerima sedikit atau tidak membayar untuk pekerjaan mereka dan dalam beberapa kasus dibuat untuk membayar denda karena tidak memenuhi kuota harian. (Human Rights Watch, 2013).

Setiap tahun, di sekolah di seluruh wilayah Uzbekistan kecuali beberapa kota-kota besar, tutup selama 3 bulan untuk panen kapas. Lebih dari satu juta anak sekolah terlibat. Mereka dipaksa bekerja di ladang yang bertentangan dengan keinginan mereka, atas perintah Pemerintah pusat dan daerah. Ini juga berlaku untuk mahasiswa perguruan tinggi, pembacanya, dan universitas; guru, pekerja, pejabat negara provinsi, petugas kesehatan, wajib militer, dan kadang-kadang bahkan tahanan. Pemerintah Uzbekistan memperlakukan para pekerja dengan semena – mena dimana para pekerja ditempatkan bersama di gedung olahraga sekolah, bioskop desa, dan gedung pertemuan. Mereka tidur di lantai dan sering kekurangan akses ke air minum, makanan yang cukup, dan fasilitas sanitasi yang higienis.

Pada tahun 2012, Pemerintah Uzbekistan memaksa lebih dari satu juta warga, yang terdiri dari anak-anak, dan orang dewasa sendiri, termasuk para guru, dokter, dan perawat untuk memanen kapas dalam kondisi yang kejam (Human Rights Watch, 2013). Pada tahun sebelumnya, 2011, Uzbekistan merupakan eksportir kapas terbesar di dunia nomer lima. Pemerintah Uzbekistan banyak menerima kritik atas tindakannya memaksa warga negaranya untuk bekerja memanen kapas sehingga Pemerintah Uzbekistan sempat melarang media internasional masuk ke negara itu selama empat tahun keempat berturut - turut, dan menangkap serta mengintimidasi aktivis lokal dan jurnalis independen yang berusaha melaporkan situasi kerja paksa.

Pada tahun ILO melakukan survey untuk mengetahui pengalaman perekrutan individu pemetik yang mencakup lebih dari 2.000 responden. Selain itu, ILO juga melakukan survei kepada sekitar 3.500 rumah tangga yang terdiri dari wawancara tatap muka secara tersebut. Hasilnya, 66% responden individu secara sukarela bekerja memanen kapas, dari 66% ini kebanyakan adalah wanita yang berasal dari daerah terpencil di Uzbekistan yang mengharapkan adanya uang tambahan, namun mereka merasa setelah bekerja mendapatkan hak yang tidak layak seperti yang dibayangkan

sebelumnya, 14% diantaranya merasa dipaksa untuk bekerja pada ladang kapas (ILO, 2017).

Dalam proses pemanennya, tiap-tiap individu dibebankan jam kerja selama kurang lebih 9 jam per harinya. Hal itu belum termasuk jika ada kerja lembur tambahan selama 2 jam untuk mengumpulkan kayu bakar. Ketika musim panen tiba, kuota yang ditentukan terbagi menjadi 3 bagian yaitu pada awal musim, kuota pemanenan untuk individu berkisar antara 60 hingga 80 kilogram per hari, kemudian pada tengah musim pemanenan turun menjadi 50 kilogram dan pada akhir masa pemanenan berkisar antara 30-40 kilogram (The Uzbek-German Forum for Human Rights, 2014).

2.3. Sistem dan Kebijakan Pekerja Paksa di Uzbekistan

Produksi kapas di Uzbekistan menggunakan sistem kuota yang ditangani oleh Pemerintah daerah di setiap regional Uzbekistan. Pemerintah pusat akan menetapkan target panen setiap tahunnya yang kemudian menyebabkan tekanan untuk Pemerintah daerah untuk mengejar target produksi sehingga membuat Pemerintah daerah akan melibatkan anak - anak dalam memanen kapas, hal tersebutlah yang menciptakan resiko keberlanjutan kerja paksa anak di Uzbekistan (United States of Bureau Of International Labor Affairs , 2017).

Dengan menggunakan tekanan administratif, Pemerintah pusat Uzbekistan menuntut kepala administrasi daerah untuk mencapai target panen kapas yang tinggi. Dengan begitu, Pemerintah pusat meminta anak-anak untuk digunakan dalam panen. Dalam laporan *Association of Human Rights in Central Asia*, para kepala daerah mengeluarkan perintah tidak tertulis untuk memobilisasi semua sekolah dan organisasi lain yang didanai negara untuk panen kapas.

Penolakan untuk bekerja pada industri kapas dapat menimbulkan konsekuensi serius. Bagi yang menolak bisa saja tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi juga

bisa berakhir di penjara dengan tuduhan palsu. Salah satu contoh kasus terjadi pada petani bernama Ferghana Ganikhon Mamatkhanov yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Petani tersebut ditahan karena diduga berencana melakukan protes terhadap Presiden Uzbekistan, Islam Karimov, tentang masalah yang dihadapi petani pada saat akan dilangsungkan pertemuan antara petani lokal dan Presiden Islam Karimov (Association of Human Rights in Central Asia, 2010).

2.4. Sejarah Fenomena Pekerja Anak di Sektor Industri Kapas Uzbekistan

Pelibatan pekerja anak dalam industri kapas di Uzbekistan telah terjadi semenjak Presiden Islam Karimov pertama menjabat pada tahun 1991. Kebijakan produksi kapas sangat terpusat dan terkontrol pada tingkat tertinggi pemerintahan hingga ke tingkatan Pemerintah daerah bahkan sekolah dan kantor-kantor. Presiden Uzbekistan, sebagai pembuat kebijakan utama terkait industri kapas, termasuk volume dan varietas yang berkembang, dan Perdana Menteri memikul tanggung jawab pribadi untuk pertanian, termasuk sektor kapas, dan secara pribadi melakukan panggilan konferensi dengan Pemerintah daerah di seluruh negeri selama seluruh rangkaian produksi kapas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Kementerian keuangan Uzbekistan bertugas untuk menentukan harga, *supply* kredit, hingga memerintahkan kepada bank milik Pemerintah untuk memberikan anggaran untuk panen bagi para petani untuk menutupi pembelian benih, bahan bakar dan pelumas, pupuk, peralatan pertanian, dan lain-lain. Para petani juga diperintahkan untuk menandatangani dokumen pembayaran gaji, yang mana mereka tidak tahu berapa banyak yang mereka dapatkan atau apa yang dapat mereka gunakan untuk itu. Beberapa kementerian lain juga memiliki bagian dalam sistem produksi kapas. Seperti, Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air yang secara umum memiliki tugas untuk memantau produksi, pelayanan pertanian, pelayanan agrikultur, dan *supply* air pada

daerah-daerah bersama Pemerintah lokal (Uzbek-German Forum for Human Rights, 2013).

Kementerian pendidikan juga ikut andil dalam memobilisasi sekolah agar memerintahkan agar anak-anak dapat berpartisipasi dalam produksi kapas, termasuk pelibatan staff pendidikan dan guru. Selanjutnya Pemerintah daerah yang mana di Uzbekistan disebut *Regional Hokims* sebagai perantara antara Pemerintah pusat dan Pemerintah kota atau yang biasa disebut *District & City Hokims* terkait kuota serta target produksi kapas. *District & City Hokims* bertugas untuk mendistribusikan kuota, mengawasi penanaman, mengawasi panen, dan mengalokasikan pekerja. Pemerintah desa dimana di Uzbekistan disebut *Mahalla* sebagai perekrut dan memobilisasi warga-warga desa untuk bekerja di sektor industri kapas. *District & City Hokims* serta *Mahalla* berisiko kehilangan tempat duduk mereka jika daerah mereka gagal memenuhi target, sementara petani yang gagal memenuhi kuota mereka dikenai berbagai sanksi - ekonomi, dan administratif (Uzbek-German Forum for Human Rights, 2013).

Sensitivitas pemerintah Uzbekistan terhadap kritik tentang sistem produksi kapasnya juga dijelaskan oleh fakta bahwa kapas adalah tanaman ekspor dan dianggap sebagai sumber daya strategis di negara tersebut.

2.5. Perjalanan Karir Presiden Islam Karimov

Islam Karimov merupakan presiden Uzbekistan yang menjabat selama 25 tahun. Terhitung sejak Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991 hingga kematiannya pada tahun 2016 (ALLGOV, 2011).

Islam Abduganievich Karimov atau Islam Karimov lahir pada tanggal 30 Januari 1938 di kota Samarkand yang merupakan bagian tenggara Republik Sosialis Soviet Uzbek (Uni Soviet). Terlahir dalam keluarga pegawai negeri, memberikan kesempatan bagi Karimov untuk mengejar pendidikan tinggi sambil menekankan pentingnya

pelayanan publik. Islam Karimov menyelesaikan studi akademisnya di Institut Politeknik Asia Tengah dan Institut Ekonomi Nasional Tashkent, kemudian mendapatkan gelar sarjana sebagai insinyur mekanik dan ekonom.

Pada tahun 1960 Karimov memulai karir kerjanya sebagai asisten konstruksi bangunan dan kemudian menjadi kepala teknolog di Pabrik Mesin Pertanian Tashkent (Tashselmash). Kemudian dari tahun 1961 sampai 1966, dia bekerja sebagai insinyur desain terkemuka di Chmarkov Tashkent Aviation Production Plant, sebuah pabrik besar yang menghasilkan pesawat kargo. Pada tahun 1966 Karimov dipindahkan ke Komite Perencanaan Negara Bagian Uni Soviet, di mana ia bekerja sebagai spesialis ilmiah yang tergolong senior dan kemudian menjabat sebagai wakil ketua pertama kantor tersebut. Pada tahun 1983 dia diangkat sebagai menteri keuangan Uni Soviet, dan pada tahun 1986 dia menjadi wakil ketua Dewan Menteri dan wakil kepala pemerintahan USSR serta ketua Kantor Perencanaan Negara.

Melalui birokrasi pemerintah republik Soviet, karir Karimov meningkat dengan cepat di jajaran Partai Komunis USSR. Pada tahun 1986 dia ditunjuk sebagai sekretaris pertama Komite Regional Kashkadarya dari Partai Komunis Uzbekistan. Pada bulan Juni 1989 ia menjadi sekretaris pertama partai komunis Uzbekistan, dan pada tanggal 24 Maret 1990, Karimov dipilih untuk menduduki posisi paling tinggi pada saat itu yaitu Presiden Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Pada tanggal 31 Agustus 1991, Islam Karimov mendeklarasikan Uzbekistan sebagai republik merdeka, 10 hari setelah percobaan kudeta di Moskow. Islam Karimov menjabat kurang lebih selama 25 tahun dari tahun 1991 hingga kematiannya pada tahun 2016 (Jack Farchy, 2016).